

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian berjudul “Diplomasi Parlemen Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Di Myanmar Melalui Sidang Umum Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Ke-44 Di Indonesia” telah menjabarkan bagaimana diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR RI dalam upaya menyelesaikan konflik Rohingya di Myanmar. Dalam melaksanakan diplomasi parlemen, DPR RI membentuk BKSAP sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD). BKSAP DPR RI menjalankan mandat untuk memperkuat diplomasi parlemen dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional Indonesia. BKSAP mengemban tanggung jawab untuk memperkuat kolaborasi diantara DPR RI dan parlemen dari negara lain serta dengan berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen maupun anggota parlemen. Dalam organisasi internasional, BKSAP DPR RI turut berperan dan terlibat aktif dalam kerja sama global, khususnya melalui partisipasinya dalam *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*. AIPA terdiri atas perwakilan parlemen dari negara-negara anggota ASEAN dan bertujuan untuk mendorong kerja sama yang lebih kuat di antara negara anggota ASEAN.

Dalam rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai bagaimana diplomasi parlemen yang dilakukan BKSAP DPR RI melalui AIPA dalam membantu menyelesaikan konflik di Myanmar, peneliti menemukan bahwa AIPA menjadi forum diskusi untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang terjadi di negara anggota ASEAN, salah satunya terkait permasalahan konflik Rohingya di Myanmar. BKSAP DPR RI selaku perwakilan parlemen dari Indonesia terus menyuarakan krisis kemanusiaan yang terjadi kepada etnis Rohingya di Myanmar. Dalam Sidang Umum yang diselenggarakan oleh AIPA, parlemen Indonesia terus mendorong agar parlemen negara-negara ASEAN dapat memberikan sikap tegas terkait konflik yang menimpa etnis Rohingya. BKSAP terus mengusulkan konflik di Myanmar agar dapat didiskusikan dan menjadi salah

satu resolusi dalam Sidang Umum AIPA, usulan ini diajukan karena parlemen Indonesia melihat konflik tersebut telah berdampak kepada negara-negara di sekitar Myanmar, terutama negara yang menerima para pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar. Selain itu, berdasarkan sudut pandang kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya tidak sesuai dengan aturan dan hukum perlindungan hak asasi manusia.

Indonesia terus mengupayakan agar krisis kemanusiaan di Myanmar bisa mendapatkan perhatian dari parlemen negara-negara ASEAN, hal tersebut dilakukan agar konflik tersebut dapat segera diselesaikan dan Myanmar dapat memulihkan kembali perdamaian dan stabilitasnya. Sehingga melalui momentum Sidang Umum AIPA ke-44 yang diselenggarakan di Indonesia, DPR RI sebagai tuan rumah sekaligus Presidensi AIPA mengusulkan *special item* mengenai upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Myanmar. Dalam resolusi tersebut negara anggota AIPA sepakat untuk membentuk tim pemantau yang bertugas mengawasi upaya perdamaian di Myanmar. AIPA membentuk sebuah badan atau komite dari parlemen, yaitu sebuah komite ad-hoc, untuk memantau pelaksanaan *Five-Point Consensus* terkait upaya penyelesaian konflik di Myanmar yang sebelumnya telah disepakati oleh negara-negara ASEAN. Selain itu, Komite Politik AIPA akan mengunjungi Myanmar secara langsung untuk mengamati kondisi masyarakat yang ada di Myanmar.

Namun dalam pelaksanaannya, implementasi dari resolusi yang telah ditetapkan dalam Sidang Umum AIPA ke-44 mengalami banyak tantangan dan hambatan. Dimana Komite *Ad-hoc* yang telah dibentuk oleh AIPA tidak diakui oleh junta militer Myanmar dan menekankan bahwa konflik yang terjadi di Myanmar merupakan urusan internal Myanmar dan AIPA tidak berhak untuk mencampuri masalah tersebut. Sehingga hingga saat ini, belum ada kesempatan bagi AIPA dan Komite *Ad-hoc* untuk ikut serta dalam penyelesaian konflik tersebut. Rencana kunjungan Komite Politik AIPA ke Myanmar juga belum berhasil dilakukan karena terdapat penolakan dari pemerintah Myanmar. Sehingga untuk saat ini Bapak Fadli Zon selaku ketua Komite Politik AIPA hanya dapat melakukan kunjungan-kunjungan ke kamp pengungsian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh. Karena, para pengungsi Rohingya yang mengungsi di Bangladesh juga menimbulkan

masalah besar, dimana terdapat jutaan masyarakat Rohingya dengan status *stateless* di tempat pengungsian tersebut.

Dapat dikatakan bahwa, untuk saat ini diplomasi parlemen yang dijalankan BKSAP DPR RI sudah cukup optimal, namun belum terlaksana secara efektif. BKSAP melalui AIPA terus berkomitmen untuk mencari solusi terhadap konflik yang terjadi di Myanmar. Namun, prinsip non-intervensi yang dipegang oleh ASEAN menjadi penghalang dalam proses konsolidasi. Prinsip non-intervensi yang mencegah negara-negara anggota ASEAN untuk campur tangan dalam urusan internal negara lain menjadi penghambat AIPA dalam melakukan pendekatan kepada Myanmar. Sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh AIPA saat ini adalah menggunakan langkah diplomatik, yaitu dengan meyakinkan pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan AIPA dalam rangka menekan tindak kekerasan di Myanmar. AIPA diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan negara anggotanya untuk selalu menyuarakan konflik yang terjadi di Myanmar. AIPA juga membangun kerja sama dengan berbagai parlemen internasional agar mendapat lebih banyak dukungan untuk memberi desakan kepada Myanmar. Hal tersebut dilakukan agar muncul kesadaran dari Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi di negaranya dan menerapkan *Five-Point Consensus* yang telah disepakati Myanmar dan negara ASEAN lainnya.

AIPA tidak bisa terus mengabaikan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar dengan mengindari diskusi dan menolak memberikan pernyataan atas masalah tersebut hanya karena menjaga hubungan baik dengan Myanmar. AIPA harus memprioritaskan perdamaian di kawasan ASEAN, dan hal tersebut hanya dapat dicapai dengan memprioritaskan perlindungan kemanusiaan. Indonesia selaku anggota AIPA, tidak bermaksud untuk campur tangan dalam urusan internal anggota ASEAN lainnya. Draf resolusi yang disampaikan BKSAP adalah bentuk kepedulian Indonesia dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya. Hal tersebut bertujuan untuk membantu Myanmar dalam memulihkan perdamaian dan stabilitas negaranya. Sehingga untuk kedepannya Myanmar diharapkan dapat lebih membuka diri dan menerima bantuan dari negara anggota AIPA.

5.2 Saran

Penulis ingin menyampaikan saran baik secara praktik maupun teoritis sebagai bentuk kontribusi dalam melakukan penelitian, yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Berikut saran yang dapat disampaikan

5.2.1 Saran Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi aktor negara maupun non-negara agar dapat terus menyuarakan krisis kemanusiaan dan konflik yang terjadi di Myanmar. Dengan tekanan yang diberikan oleh masyarakat diharapkan dapat menekan pemerintah Myanmar agar segera menghentikan konflik dan kekerasan yang terjadi di Myanmar. Diperlukan pula evaluasi dari ASEAN terkait prinsip non-intervensi yang menghambat upaya penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar. Selain itu AIPA perlu memberikan sanksi yang lebih tegas agar memberikan efek jera kepada Myanmar, sehingga tidak terjadi lagi kekerasan ataupun diskriminasi terhadap masyarakat Myanmar terutama etnis Rohingya. Negara anggota AIPA juga harus bersikap tegas dan memberi perhatian lebih terhadap konflik yang terjadi di Myanmar, agar Myanmar dapat segera mengimplemntasikan *Five-Point Consensus* yang telah disepakati bersama, sehingga perdamaian di Myanmar dapat segera terwujud.

5.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi terkait diplomasi parlemen yang dijalankan oleh Indonesia dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ASEAN. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai diplomasi parlemen yang dilakukan oleh Indonesia dalam berbagai forum internasional. Selanjutnya, peneliti menyarankan untuk membahas diplomasi parlemen yang dilakukan oleh BKSAP DPR RI baik dalam kerja sama bilateral, regional, internasional, maupun perorangan. Dengan pembahasan isu strategis yang menjadi fokus bersama bagi negara-negara ASEAN seperti, hak asasi manusia, kejahatan transnasional terorganisir, korupsi, SDGs, gender, hingga perubahan iklim.